



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025-2029
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan visi dan misi tetapi tujuan dan sasaran perangkat daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan visi dan misi tetapi tujuan dan sasaran perangkat daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	✓			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	✓			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	✓			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, September 2025

Kepala Dinas Pariwisata

ADIANSYAH, S.E., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003

Diverifikasi pada : September 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	✓			
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	✓			
3	BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
	3.1	Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	✓			
	3.2	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	✓			
	3.3	Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	✓			
4	BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
	4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	✓			
	4.2	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	✓			
5	BAB V	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, September 2025

Kepala Dinas Pariwisata



ADIANSYAH, S.E., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003

Diverifikasi pada : September 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.	
	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si..
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan Akhir RPJMD)
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD

Bandar Lampung, September 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung,

Diverifikasi pada : September 2025		Tanda Tangan
1	Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si.	
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
2	Henny Sunlinawati, S.Sos., M.M.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat Karuniannya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dengan tujuan untuk memandu perencanaan dalam rangka mendukung visi Wali Kota Bandar Lampung.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pariwisata di Kota Bandar Lampung. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis ini diharapkan Dinas Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, terarah dan terstruktur sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

ADIANSYAH, SE., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19741008 199503 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung..	III-2
3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	IV-21
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II-10
Tabel 2.2 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	II-11
Tabel 2.3 Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang.....	II-11
Tabel 2.4 Kpegawai Berdasarkan Jabatan	II-12
Tabel 2.5 Aset/Modal	II-12
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.7 Gambaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2025.....	II-21
Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah	II-26
Tabel 3.1 Sasaran pembangunan Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2025–2030.....	III-2
Tabel 3.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-7
Tabel 3.3 Objek & Daya Tarik Wisata di Bandar Lampung.....	III-15
Tabel 3.4 Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata Batu Putu Kota Bandar Lampung.....	III-17
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	IV-5
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-12
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-14
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV-22
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah	IV-22
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program	IV-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	II-10
------------	--	-------

LAMPIRAN 24
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 12 Tahun 2025. RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 atau tahapan RPJMD pertama periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2011-2015, 2016-2021, dan 2021-2026). Memperhatikan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Wali kota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar

Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata meliputi pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran, pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pariwisata tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen Dinas Pariwisata yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kota Bandar Lampung untuk RPJMD Periode 2025-2029 , yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

35. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung tahun 2023-2043);
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025- 2045;
39. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2041;
40. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
41. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
42. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025- 2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025- 2029 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Pariwisata sebagai institusi pariwisata dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025- 2029;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025- 2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Selain itu bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan

Wakil Wali Kota terpilih; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Selain itu, bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kepariwisataan secara lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan aspek potensi daerah (keragaman budaya, seni, sumber daya alam, sumber daya manusia dan dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki). Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan yang *sustainable* dan *komprehensif* diharapkan dapat menekan dampak negatif/pengaruh budaya negatif yang sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pariwisata dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal

Dinas Pariwisata merupakan pemecahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, menyelenggarakan urusan Pilihan Pariwisata. Sedangkan urusan Wajib Kebudayaan Pindah Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, telah ditetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata meliputi Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan azas otonomi dan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan standarisasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pariwisata;
- c. Pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang Kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan kearifan lokal;
- e. Pelaksanaan kebijakan destinasi, promosi, pemasaran, pengembangan kelembagaan dan ekonomi kreatif pariwisata;
- f. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata;
- g. Pelayanan administratif dan kesekretariatan; dan
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan bidang pariwisata.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pariwisata meliputi Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Kelembagaan, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan
- b. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi
- c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
- d. Pengelolaan urusan keuangan dan asset

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pengembangan Destinasi

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas menyusun perencanaan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kota di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang Pengembangan Destinasi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
- b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata. Bidang Pengembangan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;

- c. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran;
- d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi tugas Bidang Pengembangan Pemasaran kepada kepala dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :

- 1. Seksi Strategi Pemasaran;
- 2. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran; dan
- 3. Seksi Pengembangan Pasar.

5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :

- 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2. Seksi Hubungan Kelembagaan; dan
- 3. Seksi Industri Pariwisata

6. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan perencanaan program, perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, dan *stakeholder* untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia;
- d. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ekonomi Kreatif, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu:

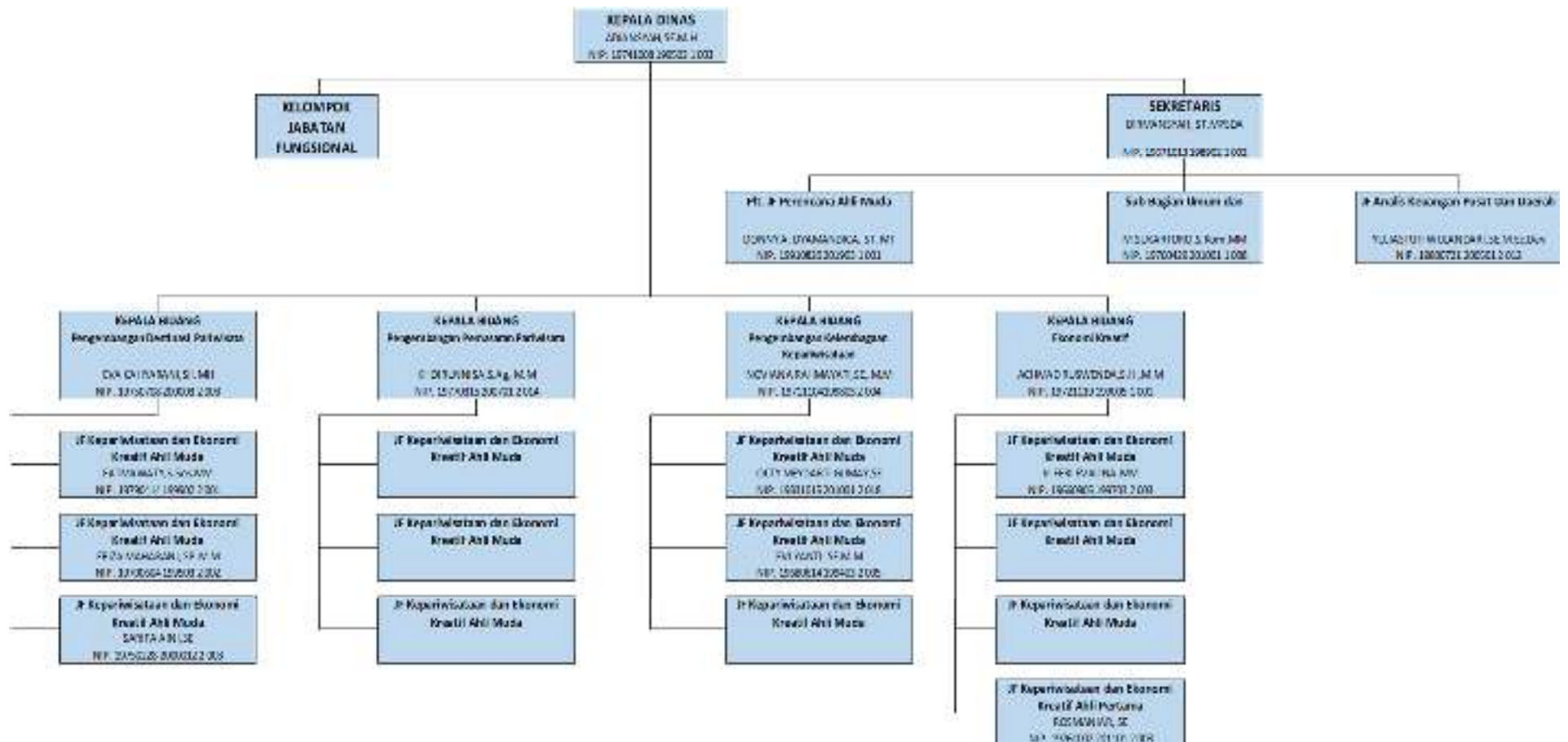
1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
3. Seksi Kerjasama dan Fasilitas.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur & Ekosistem.
 2. Seksi Objek & Daya Tarik Wisata.
 3. Seksi Tata Kelola Destinasi & Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata ;
 1. Seksi Strategi Pemasaran.
 2. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran.
 3. Seksi Pengembangan Segmen Pasar.
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata ;
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Seksi Hubungan Kelembagaan.
 3. Seksi Industri Kepariwisata.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif ;
 1. Seksi Berbasis Seni & Budaya.
 2. Seksi Berbasis Media, Desain & IPTEK.
 3. Seksi Kerja sama & Fasilitas.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

- **Sumber Daya Manusia**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan data status Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung terdapat 30 Pegawai Negeri Sipil dan orang tenaga kontrak, tenaga bantuan Polisi Pamong Praja (Pegawai Tenaga Kontrak) sebanyak 4 orang dan tenaga bantuan BKO (Bawah Kendali Operasional) sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung berjumlah 56 (lima puluh enam) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	27
2.	Perempuan	29
Jumlah		56

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2025

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	14
2.	Sarjana (S1)	21
3.	D3	6
4.	SMA	13
5.	SMP	-
6.	SD	-
Jumlah		56

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2025

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat klasifikasi berdasarkan Pendidikan ASN pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 21 orang (37,5%). Sedangkan jumlah Aparatur Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 14 orang (31%).

Tabel 2.3 Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tingkat I (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	7
Jumlah		9
2	Panata Tingkat I (III/d)	12
	Penata (III/c)	4
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
	Penata Muda (III/a)	1
Jumlah		18
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
	Pengatur (II/c)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		3
4	Tenaga kontrak	21
5	BKO Pol PP	4

6	BKO Umum	1
	Jumlah Total	56

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2025

Tabel 2.4 Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jab. Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pariwisata	1					1
2.	Sekretariat		1	1	1	7	9
3.	Bidang Pengembangan Destinasi		1	-	3	3	7
4.	Bidang Pengembangan Pemasaran		1	-	1	2	4
5.	Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan		1	-	2	1	4
6.	Bidang Ekonomi Kreatif		1	-	1	3	5
	Jumlah	1	5	1	8	15	30

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2025

- **Aset/Modal**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5 Aset/Modal

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaaan Barang		
			B	KB	RB
1	Printer	17 Unit	17	-	-
2	AC (Pendingin Udara)	22 Unit	19	3	-
3	Paket CCTV 12 Channel	1 Unit	1	-	-
4	Line Interactive UPD	3 Unit	3	-	-
5	LED Smart TV	1 Unit	1	-	-
6	Televisi	2 Unit	2	-	-
7	Speaker Portable	3 Unit	3	-	-
8	Personal Computer	16 Unit	15	1	-

9	Laptop	12 Unit	12	-	-
10	Meja Rapat	2 Unit	2	-	-
11	Alat Semprot Pertanian	5 Unit	5	-	-
12	Mesin Rumput	10 Unit	10	-	-
13	Camera	4 Unit	4	-	-
14	Stabilizer Camera	1 Unit	1	-	-
15	Wireless Camera	1 Unit	1	-	-
16	Lensa Camera	1 Unit	1	-	-
17	Tripot	1 Unit	1	-	-
18	Battery Camera	1 Unit	1	-	-
19	Brankas	2 Unit	2	-	-
20	LCD Proyektor	2 Unit	1	1	-
21	Lemari Pakaian 3 Pintu	1 Unit	-	1	-
22	Lemari Kayu 2 Pintu	3 Unit	3	-	-
23	Lemari Kayu	1 Unit	1	-	-
24	Plang/ Papan Nama	2 Unit	1	1	-
25	Papan Nama Tanah Milik Pemda Kota B. Lampung	1 Unit	1	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini (Formulir E80 tentang Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah terlampir):

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)			Realisasi Anggaran (Rp)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)		Pertumbuhan Anggaran per Tahun	Pertumbuhan Realisasi per Tahun
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah				
								Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8=6+7)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	2020	3.268.648.500,00	10.079.844.450,00	13.348.492.950,00	3.060.948.519,00	3.213.892.186,00	6.274.840.705,00	93,65%	31,88%		
2	2021	4.067.478.167,06	7.488.838.763,94	11.556.316.931,00	2.564.751.664,00	4.722.093.369,00	7.286.845.033,00	83,61%	55,63%	-13,43%	16,13%
3	2022	3.244.216.935,12	2.359.450.817,88	5.603.667.753,00	2.735.256.351,00	1.989.294.478,00	4.724.550.829,00	89,85%	77,72%	-51,51%	-35,16%
4	2023	3.919.772.114,89	4.419.739.759,11	8.339.511.874,00	2.788.804.721,00	3.144.517.269,00	5.933.321.990,00	81,55%	63,92%	48,82%	25,58%
5	2024	3.558.267.328,34	4.417.254.957,66	7.975.522.286,00	2.874.741.785,00	3.568.722.142,00	6.443.463.927,00	91,02%	74,08%	-4,36%	8,60%
Rata-Rata Pertumbuhan %										Rata-Rata Pertumbuhan %	-5,12%

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Bandar Lampung

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)		15,00		10,00	12,00	14,00	15,00	4,00	102,57	16,78	15,06	39,97	854,73	119,85	100,40
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung (hari)		1,8		1,50	1,60	1,70	1,80	1,74	1,83	1,84	1,60	116,00	114,38	108,24	88,89
3	Rata-rata nilai Belanja Wisatawan (Rp.)		12.100.000,00		11.350.000,00	11.600.000,00	11.850.000,00	12.100.000,00	11.432.000,00	11.683.402,00	13.111.695,00	13.151.697,00	100,72	100,72	110,65	108,69
4	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2,37		2,30	2,35	2,36	2,37	2,48	2,57	2,66	2,72	107,83	109,36	112,71	114,77

Tabel 2.7 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata
Kota Bandar Lampung

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	80.000.000,00	84.000.000,00	88.200.000,00	92.610.000,00	3.077.314.544,00	68.864.203,00	165.342.718,00	558.397.200,00	3.846,64	81,98	187,46	602,96	5,00%	93,35%
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.516.875,00	639.528.020,00	-	165.342.718,00	45.895.200,00	1.827,22	-	428,49	113,27	5,00%	-57,41%
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	28.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-33,33%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	45.000.000,00	47.250.000,00	49.612.500,00	52.093.125,00	2.409.466.524,00	68.864.203,00	-	512.502.000,00	5.354,37	145,74	-	983,82	5,00%	-65,71%
Program Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	149.501.000,00	140.793.000,00	161.004.948,00	405.870.695,00	149,50	134,09	146,04	350,61	5,00%	53,54%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	149.501.000,00	140.793.000,00	161.004.948,00	405.870.695,00	149,50	134,09	146,04	350,61	5,00%	53,54%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	43.771.500,00	45.887.500,00	-	59.613.000,00	-	45,89	-	54,07	3,33%	-31,72%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	43.771.500,00	45.887.500,00	-	59.613.000,00	-	45,89	-	54,07	3,33%	-31,72%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.675.000.000,00	1.758.750.000,00	1.846.687.500,00	1.939.021.875,00	480.192.442,00	569.461.100,00	1.806.377.252,00	1.313.343.850,00	28,67	32,38	97,82	67,73	5,00%	69,50%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.675.000.000,00	1.758.750.000,00	1.846.687.500,00	1.939.021.875,00	480.192.442,00	569.461.100,00	1.806.377.252,00	1.313.343.850,00	28,67	32,38	97,82	67,73	5,00%	69,50%

Anggaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi persentase penyerapan anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2021 – 2025 pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat ditunjukkan pada Tabel

Tabel 2.7 Gambaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2025

No	Program	Kegiatan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat	√	√	√	√	√
		1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
		1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√
		1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√

No	Program	Kegiatan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	√	-	√	√	-
		2.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	√	-	-	-	-
		2.3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	-	√	√
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	√	-	√	-
		4.2. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota)	√	-	-	-	-
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	√	√	√	√	√

2.1.4 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung telah melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi maupun pihak-pihak terkait guna penguatan sinergi antar daerah, memperluas akses pembiayaan dan investasi serta meningkatkan

kapasitas layanan publik khususnya dalam urusan kepariwisataan. Kerjasama yang telah dijalin oleh Dinas Pariwisata diantaranya yaitu:

1. Kerjasama Dinas antar Kabupaten/Kota;
2. Kerjasama Dinas dengan BUMD/BUMN;
3. Kerjasama Dinas dengan Universitas, Institut dan Politeknik;
4. Kerjasama Dinas dengan pelaku jasa usaha pariwisata.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, mempunyai peluang sekaligus permasalahan dan isu strategis perangkat daerah antara lain:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari Permasalahan Pembangunan daerah. Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proses administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan adanya temuan saat audit dari pihak-pihak terkait;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang belum optimal sehingga menjadi kendala saat penyusunan laporan kinerja pemerintahan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan urusan kepariwisataan;
- d. Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir belanja daerah;
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem informasi;

- f. Sarana dan prasarana yang kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan;
- g. Manajemen pegawai yang belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- h. Perubahan struktur organisasi dan mutasi pegawai mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata;

2.1.3 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selain itu, terdapat juga isu-isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu:

1. Tingginya potensi kebencanaan dan ancaman dampak perubahan iklim serta belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana di Kota Bandar Lampung. Hal ini akan berdampak pada destinasi yang terletak di wilayah yang potensi bencananya tinggi.
2. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung yang berdampak pada kurangnya area publik bagi Masyarakat yang umumnya menggunakan ruang publik sebagai sarana rekreasi.
3. Belum maksimalnya sarana prasarana transportasi umum di Kota Bandar Lampung. Dengan keterbatasan transportasi umum, maka akan mengakibatkan aksesibilitas destinasi wisata menurun. Selain itu, keterbatasan transportasi membuat biaya untuk berwisata semakin tinggi ditambah lagi dengan kemacetan dan polusi akibat dari kendaraan pribadi yang berkunjung ke destinasi wisata.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pesisir dan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Bandar Lampung memiliki letak geografis yang sangat strategis dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta kondisi sosial yang kondusif. Selain itu Bandar Lampung merupakan pusat bisnis, perdagangan (UMKM yang selalu bertumbuh) dan pusat	1. Proses administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan adanya temuan saat audit dari pihak-pihak terkait; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang belum optimal	Ketahanan pangan dan pengembangan budaya dan pariwisata belum optimal.	1. Cuaca Ekstrem yang dapat berdampak terhadap wisatawan	1. Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global yang berpengaruh terhadap destinasi wisata harus menerapkan keberlanjutan lingkungan 2. Sarana Prasarana Wilayah yang mampu mendukung kepariwisataan	1. Tingginya potensi kebencanaan dan ancaman dampak perubahan iklim serta belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana di Kota Bandar Lampung. Hal ini akan berdampak pada destinasi yang terletak di wilayah	1. Keterbatasan Infrastruktur khususnya Destinasi Wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Pengelolaan destinasi wisata yang masih belum optimal terutama untuk pariwisata yang berkelanjutan

pemerintahan di Provinsi Lampung yang menjadikan Kota Bandar Lampung memiliki <i>Privilege</i> dibanding kota/kabupaten lain di provinsi lampung.	sehingga menjadi kendala saat penyusunan laporan kinerja pemerintahan; 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan urusan kepariwisataan; 4. Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir belanja daerah; 5. Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem informasi; 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan; 7. Manajemen pegawai yang belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai; 8. Perubahan struktur organisasi dan mutasi pegawai mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata;			Kota Bandar Lampung.	yang potensi bencananya tinggi. 2. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung. Berdampak pada kurangnya area publik. 3. Belum maksimalnya sarana prasarana transportasi umum di Kota Bandar Lampung. 4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pesisir dan sumber daya alam untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.	3. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di sektor pariwisata 4. Belum optimalnya promosi yang efektif untuk menarik wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara 5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata berkelanjutan 6. Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi digital dalam pengelolaan data kepariwisataan 7. Perlu adanya revisi dokumen kebijakan di bidang kepariwisataan (RIPPARDA). 8. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana aktualisasi seni dan budaya.
---	--	--	--	----------------------	---	--

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan Visi dan Misi Wali Kota Bandar Lampung dan Wakil Wali Kota serta didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi yang akan dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata terdapat pada Misi Ketiga Wali Kota Bandar Lampung yaitu ***“Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”***. Misi ketiga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan urusan bidang kepariwisataan yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Dari Visi dan Misi Wali Kota Bandar Lampung tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuan Dinas Pariwisata yaitu ***“Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”***.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan, dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan kepariwisataan juga bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran pembangunan Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2025–2030 diukur melalui indikator tujuan dan sasaran yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kota Bandar Lampung dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran pembangunan Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2025–2030

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat										
Misi	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat										
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai	73,60	73,80	74,00	74,20	74,40	74,50	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	3	3	4	5	6	6	
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	22	25	27	30	33	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	22	22	25	27	30	33	

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata.

Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan salah satu tujuan yang masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya. Dimana ruang lingkup tata Kelola pemerintahan yang baik adalah mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, professional, berintegritas, bebas dari KKN, memiliki pelayanan publik yang baik dan mampu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Perwujudan Good Governance tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

2. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Upaya meningkatkan daya tarik destinasi wisata terus dilakukan dari tahun ke tahun. Peningkatan berupa promosi, pembenahan destinasi dan sarana penunjangnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Melalui kegiatan peningkatan ini diharapkan akan berdampak terhadap minat dan keinginan wisatawan mengunjungi Kota Bandar Lampung. Pembenahan disetiap bidang pariwisata terutama destinasi wisata yang beragam dan juga ditunjang oleh berbagai event yang terangkum dalam Kalender Pariwisata Kota Bandar Lampung setiap tahunnya agar dapat menambah waktu lama tinggal wisatawan selama di Kota Bandar Lampung sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, melalui jumlah pengeluaran wisatawan selama menginap dan berkunjung di Kota Bandar Lampung.

3. Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata

Sektor pariwisata mengalami transformasi signifikan dalam strategi pemasarannya dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku wisatawan, serta dorongan dari pemerintah dan pelaku industri telah memperluas jangkauan promosi pariwisata hingga ke pasar global. Penggunaan media sosial, platform digital, serta kerja sama dengan influencer dan pelaku industri kreatif telah menjadi pemicu utama dalam memperluas daya tarik destinasi wisata. Peningkatan ini terlihat dari semakin banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik mengunjungi destinasi-destinasi baru yang sebelumnya kurang dikenal. Strategi pemasaran berbasis data, pemanfaatan teknologi AI, serta kampanye promosi yang lebih personal dan interaktif membuat promosi pariwisata kini lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan meningkatnya jangkauan pemasaran ini, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif

Tujuan dari meningkatnya pelaku ekonomi kreatif adalah meningkatkan kualitas hidup, toleransi, dan menciptakan nilai tambah dalam industri kreatif. Tujuan lain ekonomi kreatif yaitu untuk menciptakan perubahan konsep pola bafikir sumber daya manusia demi tercapainya pertumbuhan ekonomi di era baru. Tujuan ekonomi kreatif dalam meningkatkan kualitas hidup bisa berupa menciptakan produk kreatif atau memperbaharuinya atau membuat inovasi baru. Tujuan Ekonomi kreatif dalam segi toleransi adalah menghargai hasil cipta kreator yang belum mampu bersaing dan saling memotivasi satu sama lain. Manfaat dari pengembangan ekonomi kreatif adalah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membantu citra identitas Kota Bandar Lampung berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreatifitas yang

merupakan keunggulan kompetitif Kota Bandar Lampung dan memberikan dampak sosial positif.

5. Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program pelatihan, sertifikasi, serta pendampingan telah secara signifikan meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan komunitas lokal, kini semakin banyak SDM yang memiliki keahlian profesional di bidang hospitality, pemanduan wisata, pemasaran digital, desain produk kreatif, hingga manajemen event. Hal ini menciptakan standar pelayanan yang lebih tinggi dan produk-produk kreatif yang semakin inovatif dan kompetitif di pasar global. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan dan produk, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat identitas budaya lokal. SDM yang unggul adalah fondasi utama bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tumbuh inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika zaman.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	NORMA Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA)	1. Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital 3. Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata 4. Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan	1. Sinkronisasi dengan kebijakan Pembangunan nasional dan daerah. 2. Mengidentifikasi dan memprioritaskan destinasi wisata yang berbasis budaya, alam, kuliner serta ekowisata dan desa wisata 3. Penguatan kelembagaan dan tata Kelola pemerintahan seperti menyiapkan peraturan-peraturan daerah. 4. Menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. 5. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas 6. Pemanfaatan teknologi dan informasi digital 7. Meningkatkan SDM Pariwisata (baik penyedia jasa usaha pariwisata maupun kelompok sadar wisata)	
2	STANDAR Membuat anggaran untuk pemeliharaan/revitalisasi sarana dan prasara di destinasi wisata milik Pemerintah Kota Bandar Lampung		1. Berorientasi terhadap destinasi pariwisata yang berkelanjutan 2. Memprioritaskan pada destinasi unggulan dan potensial. 3. Penyusunan anggaran maupun rencana pengembangan kedepannya berbasis data dan	

			evaluasi kinerja 4. Melakukan kolaborasi lintas sektor (Swasta, BUMN serta Kelurahan/Kecamatan) 5. Saling berintegrasi dengan Perangkat Daerah lain	
3	PROSEDUR Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan izin usaha pariwisata berbasis OSS (Online Single Submission)		1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha wisata 2. Mendampingi dan mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha. 3. Berkolaborasi lintas perangkat daerah 4. Membuat mekanisme terhadap sanksi bertahap bagi usaha-usaha wisata yang tidak memiliki izin.	
4	KRITERIA Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung membuat prioritas kegiatan maupun anggaran terhadap destinasi pariwisata unggulan		1. Penganggaran harus selaras dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD) 2. Fokus terhadap program prioritas yang memiliki dampak besar bagi Pemerintah maupun Perangkat Daerah. 3. Membuat prioritas berdasarkan data, evaluasi dan outpun serta dampak bagi Masyarakat. 4. Melibatkan Masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rencana program dan kegiatan.	

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: “Humanis, Maju, dan Berkelanjutan”.

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan issue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional”.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.
4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, meliputi :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perKotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
 - b. peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan;
 - d. pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
2. Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
- 1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional, melalui:
 - a. meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
 - b. mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;
 - c. mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. mengembangkan aksesibilitas jaringan internal Kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
 - e. melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
 - 2) Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:

- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan wilayah di sekitarnya; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- 3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, melalui:
- a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut; dan
 - b. meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;
- 4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat Kota; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan terbangun dengan kawasan pertahanan dan keamanan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8754/Bangda tanggal 7 Agustus 2023

menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD 2024 guna pelaksanaan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, dalam hal ini adalah dokumen RPJMD perubahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program. Selaras dengan telaahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Secara Umum, maksud dan tujuan dari penerapan KLHS dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: (a) saling ketergantungan (interdependency), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah. Maksud dan tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang

RPJMD sebagai salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD.

Potensi Kepariwisata Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Objek & Daya Tarik Wisata di Bandar Lampung

Wisata Alam			
No.	Objek Wisata	Jenis	Lokasi
1	Hutan Raya Wan Abdurahman	Kekayaan flora dan tanaman hutan	Sumber Agung, Kecamatan Kemiling
2	Objek Wisata Alam Batu Putu	Panorama alam dan Air Terjun	Jl. Raya Batu Putu, Telukbetung Barat
3	Taman Wisata Lembah Hijau	Panorama Alam, Outbond, Waterboom	Sukadanaham, Kec. Tanjung Karang Barat
4	Wira Garden	Panorama Alam	Batu Putu, Kec. Teluk Betung Utara
5	Pantai Duta Wisata,	Panorama alam pantai	Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat
6	Pantai Puri Gading	Panorama alam pantai, olahraga pantai (kano, menyelam), rekreasi pantai	Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat
7	Pantai Tirtayasa	Panorama alam pantai dan rekreasi pantai	Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat
8	Taman Tirtayasa	Permainan anak	Jl. Laks. Martadinata, Lempasing, Telukbetung Barat
9	Pulau Pasaran	Panorama alam	Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur

10	Taman Wisata Bumi Kedaton	Panorama alam dan atraksi hewan	Batu Putu, Kec. Teluk Betung Utara
11	Sumur Putri	Tempat bersejarah	
12	Camp 91 Kedaung Outbound	Panorama alam, pointball	Kemiling
13	Taman Cibiah	Panorama alam, wisata air	Batu Putu, Kec. Teluk Betung Utara
14	Lembah Durian	Wisata edukasi, perkemahan	Sumber Agung, Kec. Kemiling
15	Gunung Kunyit	Panorama Alam	Sukaraja, Kec. Bumi Waras
16	Camp 235	Panorama alam, pointball	Kemiling
17	Pulau Kubur	Panorama alam	Pulau Kubur
18	Taman Hutan Kera Sumur Batu	Panorama Alam	Jl. Cipto Mangunkusumo, Sumur Batu
19	Taman Hutan Kera Gunung Banten	Panorama Alam	Jl. Teuku Umar, Gg. Banten Kedaton

Wisata Alam			
No.	Objek Wisata	Jenis	Lokasi
20	Bukit Sakura	Panorama alam, Spot Foto	Jl. Melati Raya, Langkapura
21	Rumah Pohon	Panorama Alam	Kemiling
22	Teropong Kota Bukit Cindy	Panorama Alam	Tanjung Karang Barat
23	Camp Restu Bumi	Panorama Alam/Outbond	Rajabasa
Wisata Buatan			
No.	Objek Wisata	Jenis	Lokasi
1	Central Plaza	Pusat perbelanjaan	Jl. Kartini No.49, Palapa, Kec. Tj. Karang Pusat
2	Water Boom Citra Garden	Permainan air, kolam renang	Kec. Teluk Betung Utara
3	Mall Kartini	Pusat perbelanjaan	Jl. Kartini No.21, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat
4	Puncak Mas	Spot foto, panorama alam	Jl. Haji Hami RPJ Sukadanaham, Tanjungkarang Barat
5	Simpur Centre	Pusat perbelanjaan	Jl. Jenderal Gatot Suprpto
6	Taman Kupu-Kupu	Tempat penangkaran kupu-kupu	Jalan Way Rahman, Kec. Kemiling
7	Taman Agrowisata Kemiling	Agrowisata Strawberry	Kedaung, Kec. Kemiling
8	Kampung Edukasi Dlima	Tempat Belajar dan bermain	Jl. Untung Suropati Kelurahan Labuhan Ratu
9	Agrowidya Wisata	Agrowisata	Rajabasa

10	Kampung De Brow	Wisata Ekologi	Teluk Betung Barat
11	Kampung Pelangi	Wisata Ekologi	Teluk Betung Barat
12	Mall Boemi Kedaton	Pusat Perbelanjaan	Jl. Tengku Umar
13	Transmart Carrefour	Pusat Perbelanjaan	Jl. Sultan Agung No.283 Wayhalim
14	Taman Seven Selfie	Spot foto, panorama alam	Teluk Betung Barat
15	Lengkung Langit	Spot foto, panorama alam	Kemiling
16	Lampung City Mall	Pusat perbelanjaan	Jl. Yos Sudarso No.80, Bumi Waras, Kec. Bumi Waras
Wisata Sejarah dan Budaya			
No.	Objek Wisata	Jenis	Lokasi
1	Museum Lampung "Ruwa Jurai"	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung	Jl. Z.A. Pagar Alam Gedung Meneng
2	Taman Budaya	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya	Jl. Cut Nyak Dien, Tanjungkarang Pusat
3	Monumen Krakatau (Taman Dipangga)	Monumen bersejarah dan taman	Jl. W.R. Supratman, Telukbetung Utara
4	Rumah Adat Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir (Lamban Dalam Olok Gading)	Wisata Budaya	Teluk Betung Barat
5	Masjid Jamii' Al-Anwar	Masjid Tertua di Kota Bandar Lampung	Teluk Setung Selatan
6	Vihara Thay Hin Bio	Religi dan Sejarah	Teluk Betung Selatan
7	Kota Tua Teluk Betung Selatan	Wisata Sejarah	Teluk Betung Selatan
8	Masjid Agung Al-Furqon	Religi	Teluk Betung Utara

Tabel 3.4 Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata Batu Putu
Kota Bandar Lampung

No	Nama	Daya Tarik	Aktivitas Pengunjung
1	Puncak Sukadanaham, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Pemandangan Kota Bandar Lampung	Menikmati Panorama Alam dan Panorama Kota Bandar Lampung (Sky View City), Hiking.
2	Hutan Raya Wan Abdurahman, Desa Sukadanaham, Tanjungkarang Barat	Kekayaan flora dan tanaman hutan	Menikmati keindahan alam, Berkemah, dan Melakukan pengamatan terhadap keanekaragaman flora dan fauna
3	Objek Wisata Air Terjun Batu Putu, Jl. Raya Batu Putu, Telukbetung Barat	Panorama alam dan Air Terjun	Menikmati Panorama Alam dan Pemandangan Kota Bandar Lampung, Berkemah.
4	Taman Wisata Bumi Kedaton	Panorama alam dan atraksi Hewan	Melihat beraneka satwa, Panorama Alam.
5	Wisata Lembah Hijau	Tempat rekreasi	Berenang, berkemah, memancing, menikmati buahbuahan lokal, permainan petualangan, beristirahat.
6	Taman Kupu-kupu	Tempat penangkaran kupukupu	Menikmati keindahan alam, mengamati fauna kupu- kupu Sumatera serta beristirahat.
7	Lembah Durian, Kelurahan Kedaung	Menikmati buah durian,berkemah, istirahat,permainan petualangan.	Menikmati Buah Durian, Berkemah, dan beristirahat, permainan petualangan.

8	Kolam Pemancingan Yulli, Kedaung	Memancing,memakan ikan	Memancing, melakukan penelitian ikan konsumsi.
9	Mata Air Panas, Kedaung	Menikmati panorama alam	Menikmati Panorama Alam.
10	Taman Cibiah, Batu Putu	Berenang, suasana alam	Berenang, Makan di restoran, memancing, menikmati suasana alam perdesaan.
11	Simulasi Tempur 206	Bermain airsoft gun	Kegiatan permainan petualangan buatan, dan simulasi perang.

Dengan melihat potensi tersebut diatas serta kondisi fisik geografis Kota Bandar Lampung, maka arahan pengembangan kawasan pariwisata Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Membagi kawasan wisata dalam 5 (lima) zona, yaitu:

- Zona wisata alam di kawasan Batuputu, Sukadanaham dan Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (TAHURA WAR)
- Zona wisata bahari di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, khususnya di kawasan BWK G sekitar Gunung Kunyit, Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Timur (sesuai dengan rencana zonasi pesisir Kota Bandar Lampung).
- Zona wisata belanja di sekitar pusat kota, Jalan Ahmad Yani, Jalan Batu Sangkar, Jalan Kotaraja, Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan kawasan Teluk Betung.
- Zona wisata hiburan malam di kawasan Bumi Waras dan Panjang di sepanjang Jalan Yos Sudarso.
- Zona wisata budaya di kawasan cagar budaya Situr Keratuan Balau, Negeri Olok Gading, Museum Lampung, dan lainnya.

2. Pengembangan lahan terbangun dengan koefisien dasar bangunan (KDB) kecil (<40%) bagi wisata *man made* di kawasan lindung Kota Bandar Lampung.
3. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, dan hiburan lainnya.
4. Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata.
5. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata. Diperlukan studi khusus untuk mengembangkan industri kreatif di Bandar Lampung.
6. Membentuk Bandar Lampung *Tourism Information Centre* (TIC), event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk Periode 2025-2029, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang diambil, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
10. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
11. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
13. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

SUB KEGIATAN

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pengadaan Mebel
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
30. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
31. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
32. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
33. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota
34. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
35. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
36. Pengembangan Pendidikan
37. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
38. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
39. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
40. Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI

- 41. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- 42. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 43. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat						
Misi	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat						
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum dan Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif		
		Meningkatnya Daya saing Pariwisata			1. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik 2. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 3. Rata-Rata Lama Tinggal		

					Wisatawan		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Daya Tarik Destinasi Pariwisata mengalami peningkatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
						Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	

						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
				Jangkauan Pemasaran Pariwisata semakin meluas	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Penguatan Promosi Melalui Media	

						Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif			1. PAD Sektor Pariwisata 2. Rata-rata belanja wisatawan		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Kualitas ekosistem ekonomi kreatif mengalami peningkatan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						Pengembangan Pendidikan	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami peningkatan	Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
						Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan	

						Pariwisata	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang kapasitasnya dikembangkan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	%	98,00	98,00	5.324.539.851,00	98,00	5.484.166.280,74	98,00	5.772.978.505,43	98,00	5.973.636.835,89	98,00	6.046.565.394,16	98,00	6.210.409.884,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	83.439.601,00	100,00	97.759.454,00	100,00	102.647.426,70	100,00	107.779.798,04	100,00	111.168.787,94	100,00	116.727.227,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	1,00	39.700.000,00	1,00	41.685.000,00	1,00	43.769.250,00	1,00	45.957.712,50	1,00	48.255.598,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00	3,00	83.439.601,00	3,00	40.759.454,00	3,00	42.797.426,70	3,00	44.937.298,04	3,00	45.184.162,94	3,00	47.443.371,08
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	1,00	17.300.000,00	1,00	18.165.000,00	1,00	19.073.250,00	1,00	20.026.912,50	1,00	21.028.258,13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100,00	100,00	3.775.255.816,00	100,00	3.954.754.297,89	100,00	4.167.095.923,44	100,00	4.287.460.124,80	100,00	4.300.330.514,00	100,00	4.376.863.259,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35,00	35,00	3.670.234.386,00	35,00	3.844.739.514,28	35,00	4.040.053.806,63	35,00	4.168.190.010,32	35,00	4.178.755.081,09	35,00	4.252.856.318,27
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	1,00	105.021.430,00	1,00	110.014.783,61	1,00	127.042.116,80	1,00	119.270.114,48	1,00	121.575.432,90	1,00	124.006.941,56

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	7.000.000,00	100,00	10.500.000,00	100,00	11.025.000,00	100,00	11.576.250,00	100,00	12.155.062,50	100,00	12.762.815,63
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2,00	2,00	7.000.000,00	2,00	10.500.000,00	2,00	11.025.000,00	2,00	11.576.250,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98,00	98,00	154.594.932,00	98,00	170.739.822,35	98,00	179.276.813,47	98,00	188.240.654,14	98,00	197.652.686,85	98,00	207.535.321,19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	8.844.365,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	39.984.245,00	1,00	39.984.245,00	1,00	41.983.457,25	1,00	44.082.630,11	1,00	46.286.761,62	1,00	48.601.099,70
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	7.487.968,00	1,00	10.203.945,15	1,00	10.714.142,41	1,00	11.249.849,53	1,00	11.812.342,00	1,00	12.402.959,10

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	8.985.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	25.165.564,00	1,00	26.423.842,20	1,00	27.745.034,31	1,00	29.132.286,03	1,00	30.588.900,33	1,00	32.118.345,34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	1,00	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00	1,00	7.350.000,00	1,00	7.717.500,00	1,00	8.103.375,00	1,00	8.508.543,75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	47.127.790,00	1,00	57.127.790,00	1,00	59.984.179,50	1,00	62.983.388,48	1,00	66.132.557,90	1,00	69.439.185,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	396.707.502,00	98,00	351.207.502,00	98,00	368.767.877,10	98,00	387.206.270,96	98,00	406.566.584,50	98,00	426.894.913,73
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	160.500.000,00	1,00	165.000.000,00	1,00	173.250.000,00	1,00	181.912.500,00	1,00	191.008.125,00	1,00	200.558.531,25
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	108.500.000,00	1,00	58.500.000,00	1,00	61.425.000,00	1,00	64.496.250,00	1,00	67.721.062,50	1,00	71.107.115,63
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	127.707.502,00	1,00	127.707.502,00	1,00	134.092.877,10	1,00	140.797.520,96	1,00	147.837.397,00	1,00	155.229.266,85

Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	98,00	98,00	644.000.000,00	98,00	644.000.000,00	98,00	676.200.000,00	98,00	710.010.000,00	98,00	723.259.833,52	98,00	759.422.825,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	92.000.000,00	1,00	92.000.000,00	1,00	96.600.000,00	1,00	101.430.000,00	1,00	106.501.500,00	1,00	111.826.575,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	552.000.000,00	1,00	552.000.000,00	1,00	579.600.000,00	1,00	608.580.000,00	1,00	616.758.333,52	1,00	647.596.250,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00	98,00	263.542.000,00	98,00	255.205.204,50	98,00	267.965.464,73	98,00	281.363.737,96	98,00	295.431.924,86	98,00	310.203.521,10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1,00	1,00	40.806.000,00	1,00	43.710.300,00	1,00	45.895.815,00	1,00	48.190.605,75	1,00	50.600.136,04	1,00	53.130.142,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	2,00	2,00	41.916.000,00	2,00	41.916.000,00	2,00	44.011.800,00	2,00	46.212.390,00	2,00	48.523.009,50	2,00	50.949.159,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1,00	1,00	163.500.000,00	1,00	152.258.904,50	1,00	159.871.849,73	1,00	167.865.442,21	1,00	176.258.714,32	1,00	185.071.650,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1,00	1,00	7.320.000,00	1,00	7.320.000,00	1,00	7.686.000,00	1,00	8.070.300,00	1,00	8.473.815,00	1,00	8.897.505,75

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	15,06	3,00	706.000.000,00	3,00	662.678.748,67	4,00	670.617.583,49	5,00	685.558.943,25	6,00	693.959.434,41	6,00	718.565.198,29
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Laporan	1,00	-	-	1,00	35.000.000,00	1,00	136.750.000,00	1,00	38.587.500,00	1,00	40.516.875,00	1,00	42.542.718,75
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	-	-	-	-	1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	1,00	35.000.000,00	1,00	36.750.000,00	1,00	38.587.500,00	1,00	40.516.875,00	1,00	42.542.718,75
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Laporan	1,00	1,00	706.000.000,00	1,00	627.678.748,67	1,00	533.867.583,49	1,00	646.971.443,25	1,00	653.442.559,41	1,00	676.022.479,54
Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2,00	2,00	460.950.000,00	2,00	127.678.748,67	2,00	350.000.000,00	2,00	453.910.480,59	2,00	454.728.548,61	2,00	126.022.479,54
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	1,00	245.050.000,00	1,00	-	1,00	183.867.583,49	1,00	193.060.962,66	1,00	198.714.010,80	1,00	-
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	Dokumen	-	-	-	1,00	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	550.000.000,00

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	-	3,00	650.694.535,00	3,00	571.960.462,50	4,00	578.812.500,00	5,00	591.708.442,50	6,00	598.958.937,28	6,00	620.196.262,48
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Laporan	1,00	1,00	650.694.535,00	1,00	571.960.462,50	1,00	578.812.500,00	1,00	591.708.442,50	1,00	598.958.937,28	1,00	620.196.262,48
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1,00	1,00	458.460.000,00	1,00	123.000.000,00	1,00	127.150.000,00	1,00	128.507.500,00	1,00	130.932.875,00	1,00	135.480.518,75
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1,00	1,00	192.234.535,00	1,00	413.960.462,50	1,00	414.912.500,00	1,00	424.613.442,50	1,00	427.509.187,28	1,00	442.173.024,98
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	-	-	-	1,00	35.000.000,00	1,00	36.750.000,00	1,00	38.587.500,00	1,00	40.516.875,00	1,00	42.542.718,75
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	-	-	22,00	103.757.000,00	25,00	105.000.000,00	27,00	107.339.400,00	30,00	108.654.682,50	33,00	112.507.258,50
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,37	2,38	-	2,40	103.757.000,00	2,52	105.000.000,00	2,65	107.339.400,00	2,78	108.654.682,50	2,92	112.507.258,50
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1,00	1,00	-	1,00	68.757.000,00	1,00	69.250.000,00	1,00	70.801.900,00	1,00	71.290.307,50	1,00	74.854.822,88
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	-	-	-	1,00	35.000.000,00	1,00	35.750.000,00	1,00	36.537.500,00	1,00	37.364.375,00	1,00	37.652.435,63

Bidang Urusan /Program /Outcome /Kegiatan/Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	-	22,00	2.257.000.000,00	22,00	2.191.416.928,83	25,00	2.217.669.916,51	27,00	2.245.488.367,94	30,00	2.273.003.442,13	33,00	2.353.597.469,99
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Orang	50,00	50,00	2.257.000.000,00	50,00	2.156.416.928,83	50,00	2.180.919.916,51	50,00	2.206.900.867,94	50,00	2.232.486.567,13	50,00	2.311.054.751,24
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1,00	1,00	1.015.000.000,00	1,00	1.151.850.341,83	1,00	1.022.250.000,16	1,00	1.033.362.500,17	1,00	1.040.030.625,18	1,00	1.072.032.156,44
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	50,00	50,00	60.000.000,00	50,00	63.000.000,00	50,00	66.150.000,00	50,00	69.457.500,00	50,00	70.930.375,00	50,00	74.476.893,75
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	30,00	30,00	487.000.000,00	30,00	406.066.587,00	30,00	426.369.916,35	30,00	434.623.367,77	30,00	438.354.536,16	30,00	454.272.262,97
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	300,00	300,00	635.000.000,00	300,00	472.500.000,00	300,00	600.000.000,00	300,00	605.000.000,00	300,00	617.490.655,79	300,00	641.309.044,34
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50,00	50,00	60.000.000,00	50,00	63.000.000,00	50,00	66.150.000,00	50,00	64.457.500,00	50,00	65.680.375,00	50,00	68.964.393,75
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang kapasitasnya dikembangkan	Orang	-	20,00	-	22,00	35.000.000,00	25,00	36.750.000,00	27,00	38.587.500,00	30,00	40.516.875,00	33,00	42.542.718,75
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	-	-	-	20,00	35.000.000,00	25,00	36.750.000,00	30,00	38.587.500,00	35,00	40.516.875,00	40,00	42.542.718,75

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	

			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
--	--	--	---	--

4.2 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, yaitu:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN,
UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN
RAKYAT”**

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam RPJMD Dinas Pariwisata terdapat dalam Misi Ketiga yaitu:

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Sehubungan hal tersebut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan yang termuat dalam RPJMD yaitu:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Sasaran yang termuat dalam RPJMD yaitu:

Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama:

1. PAD Sektor Pariwisata
2. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik
3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
4. Rata-rata belanja Wisatawan
5. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Indikator Kinerja Daerah:

1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja Program:

1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
2. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
3. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki kekayaan intelektual
4. Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Juta orang	2,42	2,54	2,66	2,79	2,93	3,07	
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	15,50	16,20	17,00	17,85	18,70	19,60	
3	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,90	2,00	2,05	2,12	2,18	2,25	
4	PAD Sektor Pariwisata	%	34,76	35,46	36,17	36,89	37,63	38,38	
5	Rata-rata Belanja wisatawan	Rupiah	13.200.000	13.332.000	13.465.000	13.599.000	13.735.000	13.873.000	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,88	2,89	2,91	2,92	2,93	2,96	
2	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3	3	4	5	6	6	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	3	3	4	5	6	6	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki kekayaan intelektual	%	0	22	25	27	30	33	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	22	22	25	27	30	33	

BAB V. PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata selama periode Tahun 2025-2029 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pariwisata memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Pariwisata sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

LAMPIRAN

[illegible]

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS PARIWISATA



ADIANSYAH, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197411008 199503 1 003

POHON KINERJA DINAS PARIWISATA 2025

MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

INDIKATOR KINERJA
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Dan
Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif

Meningkatnya Daya saing Pariwisata
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung
Rata-rata Belanja Wisatawan

Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif
Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya Kualitas Pemasaran Pariwisata
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata

Berkembangnya Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan

Terkelolanya Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Destinasi Pariwisata Yang Dikelola

Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis

Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Jumlah SDM Pariwisata yang

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM Pariwisata yang profesijumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang kapasitasnya dikembangkan

Terencana dan terancangnya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Berkembangnya destinasi pariwisata
Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,

Terfasilitasinya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

Berkembangnya Pendidikan
Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan

Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Diberdayakannya Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKONI
Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya

Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk

Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS PARIWISATA



ADIANSYAH, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PEMANGKANG JAWAB	LOKASI	
		Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030								
										TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH							
Meningkatkan a Nihil Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							Rasio FDR Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,72	2,80		2,89		2,91		2,92		2,93		2,96								
							Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		3,20								
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.938.234.386,00		9.013.979.428,74		9.345.078.505,43		9.603.731.989,58		9.721.141.898,48		10.015.276.073,26			56.637.442.265,49		Bandar Lampung		
Meningkatkan daya penyediaan layanan Urusan Pariwisata a	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		73,40	73,60	8.938.234.386,00		9.013.979.428,74		9.345.078.505,43		9.603.731.989,58		9.721.141.898,48		10.015.276.073,26			56.637.442.265,49		Bandar Lampung			
	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		90,00	90	5.324.539.051,00		5.484.166.200,74		5.772.978.505,43		5.973.636.835,09		6.046.565.394,36		6.210.409.084,00		90,00		34.012.296.751,22				
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	100	83.439.601,00		83.439.601,00		83.439.601,00		83.439.601,00		83.439.601,00		83.439.601,00		100,00		619.522.295,01		Bandar Lampung		
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				1	39.700.000,00		1	41.085.000,00		1	43.769.250,00		1	45.957.712,50	1	48.255.998,13	5,00	219.367.560,63		
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	12,00	3	83.439.601,00		2	40.759.454,00		3	42.797.426,70		2	44.937.290,04		3	45.184.162,94	3	47.443.371,08	10,00	304.561.313,76	
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				1	17.300.000,00		1	18.165.000,00		1	19.073.250,00		1	20.026.912,50	1	21.028.258,13	5,00	95.593.420,63		
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100,00	100	3.775.255.816,00		100	3.954.754.297,89		100	4.167.895.923,44		100	4.287.460.124,00		100	4.380.330.514,00	100	4.376.863.259,83	100,00	24.061.759.935,95	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	35,00	35	3.670.234.386,00		35	3.844.739.514,20		35	4.040.053.806,63		35	4.148.190.010,32		35	4.178.751.081,09	35	4.252.056.318,27	35,00	24.154.829.116,59	
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengadaan/Verifikasi Keunggulan SKPD		Dokumen	1,00	1	105.021.430,00		1	110.014.780,63		1	127.042.116,00		1	119.270.114,48		1	121.575.432,90	1	124.006.914,56	6,00	706.930.019,36	
	3	26	01	2.05		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		%	100,00	100	7.000.000,00		100	10.500.000,00		100	11.025.000,00		100	11.576.250,00		100	12.155.062,50	100	12.762.815,63	100,00	65.019.128,13	
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	2,00	2	7.000.000,00		2	10.500.000,00		2	11.025.000,00		2	11.576.250,00		2	12.155.062,50	2	12.762.815,63	12,00	65.019.128,13	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	90,00	90	154.594.932,00		90	170.739.822,35		90	179.276.813,47		90	188.240.654,14		90	197.652.686,85	90	207.535.321,19	90,00	1.090.040.230,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	1,00	1	8.844.365,00		1	10.000.000,00		1	10.500.000,00		1	11.025.000,00		1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	6,00	64.100.677,50	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor		Paket	1,00	1	39.984.245,00		1	39.984.245,00		1	41.903.457,25		1	44.002.630,11		1	46.286.761,62	1	48.001.099,70	6,00	260.922.438,68	
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga		Paket	1,00	1	7.407.760,00		1	10.203.945,15		1	10.714.142,41		1	11.249.809,53		1	11.812.342,00	1	12.402.909,10	6,00	63.071.206,19	
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	1,00	1	6.905.000,00		1	10.000.000,00		1	10.500.000,00		1	11.025.000,00		1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	6,00	64.241.312,50	
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	1,00	1	25.165.564,00		1	26.423.042,20		1	27.745.034,31		1	29.122.206,03		1	30.580.900,33	1	32.118.345,34	6,00	171.173.972,21	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan		Dokumen	1,00	1	7.000.000,00		1	7.000.000,00		1	7.550.000,00		1	7.717.500,00		1	8.103.375,00	1	8.508.543,75	6,00	45.679.418,75	
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitas Konsumsi Tamu		Laporan	1,00	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00		1	10.500.000,00		1	11.025.000,00		1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	6,00	65.256.312,50	
	3	26	01	2.06	0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1,00	1	47.127.790,00		1	57.127.790,00		1	59.984.179,50		1	62.903.380,48		1	66.132.557,90	1	69.439.105,79	6,00	362.794.891,67	
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah		%	90,00	90	396.707.502,00		90	351.207.502,00		90	368.767.877,10		90	387.206.270,96		90	406.566.584,50	90	426.894.913,73	90,00	2.337.350.050,29	
	3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	1,00	1	160.500.000,00		1	165.000.000,00		1	171.250.000,00		1	181.912.500,00		1	191.000.125,00	1	200.598.531,25	6,00	1.072.229.156,25	
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Unit	1,00	1	100.500.000,00		1	58.500.000,00		1	64.425.000,00		1	64.496.250,00		1	67.721.062,50	1	71.107.115,63	6,00	431.749.428,13	
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Kantor		Unit	1,00	1	127.707.502,00		1	127.707.502,00		1	134.092.877,10		1	140.707.520,96		1	147.837.297,00	1	155.229.266,85	6,00	833.972.065,91	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah		%	90,00	90	644.000.000,00		90	644.000.000,00		90	676.200.000,00		90	710.010.000,00		90	723.259.833,52	90	759.422.825,19	90,00	4.156.892.658,71	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	1,00	1	92.000.000,00		1	92.000.000,00		1	96.600.000,00		1	101.400.000,00		1	106.501.500,00	1	111.826.575,00	6,00	600.358.075,00	
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	1,00	1	552.000.000,00		1	552.000.000,00		1	579.600.000,00		1	608.500.000,00		1	636.750.333,52	1	667.596.250,19	6,00	3.556.534.583,71	

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGKANG JAWAB	LOKASI
		TAHUN 2025		TAHUN 2026						TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030											
		TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH					TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH								
	Meningkatkan Daya Pelaku Ekonomi Kreatif					PAD Sektor Pariwisata	%	34,08	34,76	35,46	36,17	36,89	37,63	38,38	38,38												
						Rata-rata belanja wisatawan	Rp	13.151.697,53	13.200.000	13.332.000	13.465.000	13.599.000	13.735.000	13.873.000	13.873.000,00												
		3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLENGKAPAN BAK KEMAYAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Keahlian Intelektual	%	-	-	-	22	183.757.000,00	25	105.000.000,00	27	107.339.400,00	30	108.654.682,50	33	112.507.258,50	22,83	537.258.341,00			Bandar Lampung	
		3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,37	2,70	-	2,80	183.757.000,00	2,90	105.000.000,00	3,00	107.339.400,00	3,10	108.654.682,50	3,20	112.507.258,50	2,95	537.258.341,00			Bandar Lampung	
		3	26	04	2.02	0002 Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dukungan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dukungan	1,00	-	-	1	68.757.000,00	1	69.250.000,00	1	70.801.900,00	1	71.290.307,50	1	74.854.802,87	5,00	354.954.030,37			Bandar Lampung	
		3	26	04	2.02	0003 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	-	-	-	1	35.000.000,00	1	35.750.000,00	1	36.537.500,00	1	37.364.375,00	1	37.652.435,63	5,00	182.304.310,63			Bandar Lampung	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan terakreditasi	%	-	22	2.257.000.000,00	22	2.191.416.928,83	25	2.217.669.916,51	27	2.245.488.367,94	30	2.273.003.642,13	33	2.353.597.466,99	26,50	13.538.176.125,40			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang profesional	Orang	50,00	50	2.257.000.000,00	50	2.156.416.928,83	50	2.180.919.916,51	50	2.206.900.867,94	50	2.232.486.567,13	50	2.311.054.751,24	300,00	13.344.779.031,65			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	0005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Komoditas dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Komoditas dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1,00	1	1.815.000.000,00	1	1.521.850.343,82	1	1.822.250.000,16	1	1.832.362.500,17	1	1.840.030.625,18	1	1.872.032.156,44	6,00	6.324.525.623,77			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	50,00	50	60.000.000,00	50	63.000.000,00	50	66.150.000,00	50	69.457.500,00	50	70.930.375,00	50	74.476.093,75	300,00	404.014.768,75			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan Jukdis SKKNI	Orang	30,00	30	487.000.000,00	30	406.066.587,00	30	426.369.916,35	30	434.623.367,77	30	438.354.536,16	30	454.272.262,97	180,00	2.646.686.678,25			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	0009 Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	300,00	300	635.000.000,00	300	472.500.000,00	300	600.000.000,00	300	605.000.000,00	300	617.490.655,79	300	641.309.044,34	1.800,00	3.571.299.700,13			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.01	0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50,00	50	60.000.000,00	50	63.000.000,00	50	66.150.000,00	50	69.457.500,00	50	65.680.375,00	50	68.964.393,75	300,00	380.252.268,75			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kapasitasnya Dikembangkan	Orang	-	-	-	22	35.000.000,00	25	36.750.000,00	27	38.587.500,00	30	40.516.875,00	33	42.542.718,75	137,00	193.397.093,75			Bandar Lampung	
		3	26	05	2.02	0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	-	-	-	20	35.000.000,00	25	36.750.000,00	30	38.587.500,00	35	40.516.875,00	40	42.542.718,75	150,00	193.397.093,75			Bandar Lampung	
TOTAL										8.938.234.386,00		9.013.976.428,74		9.345.078.585,43		9.603.733.009,58		9.721.141.890,68		10.015.276.073,26		56.637.442.265,49					

1 Untuk Para Anggaran Tahun 2025 sesuai APBD Tahun 2025
2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Menggunakan PermenpanRB No. 1001.1/2015-3406 Tahun 2024
Tentukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

BANDAR LAMPUNG, 2 JANUARI 2025

KEPALA DINAS PARAWISATA

BANDAR LAMPUNG